

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap warga negara agar terciptanya jiwa yang kompeten dan mempunyai karakter yang baik. Namun, saat ini hilangnya karakter kewarganegaraan pada peserta didik disebabkan oleh perkembangan zaman faktor sosial dan lingkungan, sehingga menimbulkan sikap egois karena cara pandang dan perilaku yang berpusat pada diri sendiri yang membuat peserta didik melakukan kenakalan remaja di sekolah. Dalam konteks inilah proses membentuk perilaku seseorang harus dibekali dengan penanaman karakter yang baik sehingga mampu membentuk pemikiran yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi bahwa:

Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Civic Disposition atau yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau karakter yang mendukung dan mempromosikan kewarganegaraan dan pemerintahan. Branson (1999:12), mengatakan bahwa “perilaku kewargaan merupakan karakteristik atau karakteristik publik dan privat yang sangat penting dalam mendukung dan mempertahankan demokrasi. Sesuai dengan beberapa hal tersebut, maka penerapan karakter bangsa (*citizen character*) harus diciptakan melalui pendidikan”.

Guru PPKn berperan penting membangun karakter warga negara yang baik agar kelak menjadi warga masyarakat sekaligus warga negara yang cerdas, terampil dan berwatak sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara. Pada tataran kurikuler PPKn baik substansi, proses

pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya, sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, guru PPKn bertanggung jawab dalam menanamkan perilaku peserta didik sesuai dengan manfaat dari pembentukan karakter. Dengan demikian, tugas pendidik dalam pembelajaran harus dilakukan secara efektif dan profesional, peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan pembelajaran namun, guru juga harus mendorong peserta didik dalam belajar karena proses pendidikan dan pembelajaran menuntut peserta didik untuk secara sadar lebih mengembangkan informasi, pola pikir, dan kemampuan.

Menurut Usman (2010:5) menjelaskan bahwa “guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”. Pendapat lain dikemukakan oleh Asmani (2014:17), menyatakan bahwa “guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa depannya. Jika guru mampu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya, maka hal itu akan menjadi kekuatan anak didik dalam mengejar cita-citanya dimasa depan”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dikemukakan bahwa guru adalah teladan, inspirator, dan motivator siswa yang dalam menjalankan tugasnya memerlukan keahlian khusus, guru yang berperan sebagai teladan inspirator dan motivator bagi peserta didik tentunya menjadi bagian penting yang tidak dapat tergantikan dalam proses pembelajaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 1 ayat berbunyi : “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Dapat ditegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab mengajar, mendidik, membimbing, menyediakan fasilitas

belajar serta tugas guru untuk mengawasi dan membentuk peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dari berbagai pernyataan di atas maka jelas sekali bahwa guru PPKn harus mempunyai tanggung jawab untuk membentuk peserta didiknya ke arah yang baik dan berperilaku positif dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik.

Saat ini masih ada beberapa diantara peserta didik di sekolah tidak memiliki rasa hormat dan segan terhadap guru-guru di sekolah, tidak hanya itu bahkan kepada orang tuanya sendiri pun melakukan hal yang sama. Hal tersebut dimulai karena tidak ada karakter atau watak yang selaluditanamkan dari dirinya.

Berdasarkan observasi awal di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menurut salah seorang guru, jika melihat permasalahan yang ada saat ini, peran guru PPKn masih belum terlaksana secara optimal dalam penanaman (*civic disposition*) khususnya di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, dimana masih adanya peserta didik yang masih belum memiliki karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dengan baik dan masih ditemukan beberapa permasalahan seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Mandrehe Utara antara lain, masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak masuk saat pembelajaran, kurangnya kedisiplinan, merokok di lingkungan sekolah dan membuang sampah sembarangan. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya penanaman (*civic disposition*) karakter melalui mata pelajaran PPKn di tingkat sekolah.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus penelitiannya adalah mengamati dan mengungkap permasalahan tentang **Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menamkan *Civic Disposition* Bagi Peserta Didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara.**

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian, maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe utara ?
- 2) Apa kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe utara ?
- 3) Apa upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan harapan yang akan di capai dalam suatu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara.
3. Untuk mengetahui apa upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan hal manfaat yang ingin di capai setelah dilaksanakan penelitian. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Umum

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperkaya khasanah penulisan karya ilmiah serta pengembangan dan kemajuan

ilmu pengetahuan terutama dalam hal peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik.

2. Secara Khusus

- a. Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi kepala sekolah dalam merancang program-program pembinaan karakter yang lebih terarah dan sistematis, sejalan dengan visi dan misi sekolah.
- b. Bagi guru, hasil penelitian mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik mengajarnya selama ini, serta memperbaiki atau meningkatkan aspek-aspek yang masih kurang dalam membina *civic disposition* peserta didik.
- c. Bagi siswa, untuk meningkatkan tingkat kesadaran siswa tentang pentingnya *civic disposition* sehingga dapat menumbuhkan karakter peserta didik.
- d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan luas atau cakrawala berpikir dan memberi pengalaman berharga sebagai calon guru profesional di masa yang akan datang.